

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dan kontrak komersial*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Afifah Kusumadara, *Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Depok, Rajawali Pers, 2022)
- Bayu Seto Hardjowahono & Denny Lesmana, *Perancangan Kontrak Bisnis* (Bandung, Citra Aditya, 2019)
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Elisabeth Nurhaidni Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah Langkah menemukan kebenaran dalam ilmu hukum* (Bandung, Refika Aditama, 2018)
- Fauzan, & Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi* (Jakarta, Kencana, 2017)
- Gunawan Nachrawi, *Hukum Kontrak Komersial* (Bandung, Cendekia Press, 2020)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan hukum perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung, Citra Aditya, 2013)
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian, dan Penerapannya di bidang Kenotariatan* (Bandung, Citra Aditya, 2019)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normative* (Jakarta, Nusamedia, 2014)
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2005)

- Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian build, Operate and Transfer (BOT) atas Tanah*, (Yogyakarta Laksbang Presindo 2016)
- Mashudi, Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju
- Jimmy Asshiddigie, *Perihal Undang Undang* (Depok, Raja grafindo, 2011)
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011,
- Joni Emirzon & Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik*, (Jakarta, Kencana, 2021)
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian* (Bandung, Citra Aditya, 2001)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam putusan Hakim* (Sinar Grafika, 2020)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta, Gramedia Jakarta, 2006)
- Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Rio Christiawan & Retno Wulandari, *Hukum Kontak Bisnis* (Jakarta, Sinar Grafika, 2023)
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta Sinar Grafika, 2019)
- _____, *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta Sinar Grafika, Jakarta)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Oktober 2003.
- Shidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2014)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011)

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita)

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2015)

_____ *Mengenal Hukum* (Yogyakarta, Mahakarya Pustaka, 2019)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

Zainal Arifin Mochtar & Edy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori Asas, dan Filsafat Hukum* (Depok, Rajawali Pers, 2024)

Jurnal Nasional

Encep Mindar, Elan Jaelan, *Perspektif UU No. 24/2009 terhadap legalitas Kontrak Bisnis Internasional yang bermodel Monolingual Asing*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 2023 DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.136>

Gandes Ristiyana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009*, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 1, 2021, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39136>

Habib Adjie, *Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia*, Jurnal Education and development, Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2>

Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, *Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing*, Acta Comitatus, Jurnal Kenotariatan, Vol 05 No 01 April 2020. DOI : [10.24843/AC.2020.v05.i01.p08](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p08)

Reza Fikri Febriansyah, *Konstitusionalitas Bahasa dalam Perjanjian*, RechtsVinding Online, Jurnal Rechvinding, 2017, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Konstitusionalitas%20Bahasa%20Dalam%20Transaksi%20Niaga.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undanga Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas undanga-undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 34)

Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)

Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, lagu kebangsaan dan lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 109)

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 63 Tahun 2019, tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 180)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, jo, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 4 Desember 2014; jo Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar., tanggal 6 Maret 2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :601 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015; jo Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 48/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 7 Mei 2014; jo Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN.Jak.Bar tanggal 20 Juni 2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3395 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 408/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 7 September 2018; jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.,tanggal 14 Maret 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor:3415 K/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 575/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2020, jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 590/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020

Website/ Internet

<https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 17 juni 2024.

<https://kbbi.web.id/peradilan>, diakses pada tanggal 13.03.2023

STHI Jentera “Sema bukan peraturan perundang-undangan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sthi-jentera,”sema-bukan-peraturan-perundang-undangan--tidak-akuntabel”>diakses 17 Juni 2024

